



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RACHMAN JAYA
2. Jabatan : KEPALA BALAI
3. NHK : 954511

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	714.000.000
1. Tanah Seluas 215 m ² di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 91.000.000		
2. Bangunan Seluas 350 m ² di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 555.000.000		
3. Tanah Seluas 90 m ² di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 68.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	254.500.000
1. MOTOR, HONDA SUPRA X 125 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000		
2. MOTOR, YAMAHA YAMAHA MIO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000		
3. MOBIL, HONDA Brio SATYA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 245.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	250.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	968.750.000
III. HUTANG	Rp.	110.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	858.750.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AGUNG LASMONO
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 903989

II. DATA HARTA

		Rp.	
A. TANAH DAN BANGUNAN		550.000.000	
1.	Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000		
2.	Tanah Seluas 135 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000		
3.	Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, WARISAN Rp. 100.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN		60.000.000	
1.	MOBIL, XENIA SPORTY Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000		
2.	MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA		23.000.000	
D. SURAT BERHARGA		---	
E. KAS DAN SETARA KAS		24.650.000	
F. HARTA LAINNYA		---	
Sub Total		657.650.000	
III. HUTANG		88.670.000	
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)		568.980.000	

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARTHA MUCHTAR DJALIL
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
3. NHK : 903524

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	870.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 870.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	43.000.000
1. MOTOR, VESPA PRIMAVERA Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 43.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	19.738.165
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	932.738.165
III. HUTANG	Rp.	524.103.543
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	408.634.622

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ASROPI
2. Jabatan : PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
3. NHK : 769188

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	455.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000		
2. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	126.000.000
1. MOBIL, SUZUKI ERTIGA GX Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA MIO SPORTY Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000		
3. MOTOR, HONDA ADV 150 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 24.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	31.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	83.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	695.000.000
III. HUTANG	Rp.	235.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	460.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARFI IRAWATI
2. Jabatan : PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
3. NHK : 840766

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.275.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 800 m2/500 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 173 m2/173 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000		
3. Tanah Seluas 1.650 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
4. Tanah Seluas 800 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	8.350.000
1. MOTOR, HONDA NF 100 SL Tahun 2007, WARISAN Rp. 3.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA MIO 28D (MIO/AL115S)A/T Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 5.350.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	20.900.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.556.169
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	1.307.806.169
III. HUTANG	Rp.	106.326.400
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.201.479.769



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.